

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan penyusunan dan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan adalah untuk memberikan keyakinan kepada para pemangku kepentingan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara melakukan pemeriksaan (audit) atas laporan keuangan oleh auditor independen yang berkompeten dan objektif, sehingga laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku serta bebas dari salah saji material.

Auditor independen sering disebut juga sebagai auditor eksternal atau akuntan publik yang telah memiliki sertifikat (*Certified Public Accountant*). Auditor eksternal adalah pihak independen dari luar perusahaan yang bertugas dalam melaksanakan audit dengan tujuan memberikan pendapat (opini) tentang apakah laporan keuangan yang dibuat manajemen perusahaan (Ely Suhayati, 2021;46) Dalam menjalankan tugasnya, auditor tidak hanya bertanggung jawab kepada klien, tetapi juga kepada berbagai pihak lain seperti para pemangku kepentingan yang sangat membutuhkan laporan keuangan (Arum Ardianingsih, 2018;26).

Pelaksanaan audit terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan perusahaan infrastruktur dilakukan dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, transparansi dan akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk menjamin kualitas hasil audit keuangan perusahaan, pelaksanaannya perlu berpedoman pada standar audit yang berlaku di Indonesia. Standar pemeriksaan yang digunakan dalam melakukan pemeriksaan selama ini adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) merupakan patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (BPK RI, 2017).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksa

keuangan merupakan orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI, 2017).

Pernyataan auditor dapat disajikan melalui laporan tertulis berupa laporan audit. Dalam laporan audit tersebut, seorang auditor merumuskan opini atas laporan keuangan berdasarkan hasil evaluasi terhadap semua bukti audit yang telah diperoleh, yang kemudian dapat digunakan sebagai dasar dalam menarik kesimpulan mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan (Fauziyah, 2019;231). Opini audit menurut standar akuntansi merupakan pernyataan yang disampaikan oleh seorang akuntan publik yang terdaftar sebagai hasil evaluasi atas kewajaran laporan keuangan yang telah diberikan oleh perusahaan (Rizkillah & Nurbaiti, 2018). Opini audit berfungsi memberikan keyakinan yang memadai bagi pemangku kepentingan mengenai laporan keuangan perusahaan klien tentang keandalan laporan keuangan (Arum, 2018;157).

Salah satu jenis opini audit yang menjadi perhatian penting bagi para pemangku kepentingan adalah opini *going concern*. Menurut Standar Audit (SA) 570 bahwa *opini going concern* adalah sebuah pertimbangan auditor apabila timbul keraguan atas kemampuan audit dalam mempertahankan keberlangsungan hidup usahanya (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2021). Opini *going concern* merupakan hal yang penting bagi para pemegang kepentingan (*stakeholders*) terutama pada investor. Investor melakukan kegiatan penanaman modal dengan tujuan mendukung pendanaan perusahaan dan kemudian memperoleh keuntungan keuangan dimasa mendatang. Oleh karena itu, investor membuat suatu keputusan investasi terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi keuangan suatu perusahaan dengan cara melihat dan menganalisis laporan keuangan.

Perusahaan yang menerima opini *going concern* disebabkan oleh lemahnya kinerja keuangan yang ditandai dengan penurunan profitabilitas, arus kas negatif, serta tingginya tingkat utang yang tidak sebanding dengan aset yang dimiliki (Abdul, 2020). Disisi lain, kelemahan dalam sistem pengendalian internal dan pengawasan manajemen turut memperburuk kondisi perusahaan (Nih Putu Widhiastuti & Putu Diah Kumalasari, 2022). Oleh karena itu, auditor

merekomendasikan agar perusahaan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan keuangan dan operasionalnya, serta memperkuat tata kelola dan pengawasan internal guna meningkatkan keandalan laporan keuangan dan menjamin keberlangsungan usaha.

Salah satu fenomena opini audit *going concern* pada perusahaan BUMN infrastruktur yang menjadi perhatian adalah PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang menerima opini audit *going concern* pada tahun 2022 dan 2023, PT Adhi Karya juga menerima opini audit *going concern* pada tahun 2019 – 2021, serta PT Wijaya Karya (Persero) Tbk yang menerima opini audit *going concern* pada tahun 2023. Penerimaan opini audit *going concern* tersebut dipicu oleh tekanan kinerja keuangan yang signifikan, antara lain penurunan pendapatan usaha, tingginya beban utang, serta tekanan arus kas yang terjadi sejak periode pandemi COVID-19. Sebagai gambaran kondisi keuangan yang melatarbelakangi fenomena tersebut, berikut disajikan data pendapatan usaha tiga perusahaan BUMN infrastruktur representatif, yaitu PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk periode 2018-2024.

Tabel 1. 1

Nilai Pendapatan Usaha Perusahaan Infrastruktur

Nama Perusahaan	Pendapatan Usaha						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PT Adhi Karya	15.655.500	15.307.860	10.827.682	11.530.472	13.549.010	20.072.993	13.352.718
PT Waskita Karya	48.788.951	31.387.390	16.190.456	12.224.128	15.300.000	10.950.000	10.700.000
PT Wijaya Karya	31.158.193	27.212.923	16.536.381	17.809.718	21.480.000	22.594.000	19.240.000

Sumber : *Bursa Efek Indonesia*

Berdasarkan Tabel 1.1 Nilai Pendapatan Usaha Perusahaan BUMN Infrastruktur, terlihat bahwa PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk mengalami penurunan pendapatan usaha yang signifikan selama periode 2018-2020, khususnya pada tahun 2020 yang bertepatan dengan terjadinya pandemi Covid-19. Penurunan pendapatan yang terdapat pada tabel di atas mencerminkan melemahnya kinerja operasional perusahaan yang disebabkan oleh penghentian sementara proyek

infrastruktur, keterlambatan penyelesaian pekerjaan, serta rendahnya perolehan kontrak baru. Kondisi tersebut berdampak pada tekanan arus kas dan menurunnya kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Lemahnya kinerja keuangan inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor yang mendorong auditor untuk memberikan opini audit *going concern* kepada perusahaan BUMN infrastruktur, sebagaimana yang dialami oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya Tbk (Persero), dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk pada periode setelahnya. Oleh karena itu, fenomena penerimaan opini audit *going concern* pada perusahaan BUMN sektor infrastruktur periode 2019-2024 menjadi topik yang penting dan relevan untuk diteliti lebih lanjut.

Pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk memperoleh pendapatan pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp 15.655.500 juta dan mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi Rp 15.307.860 juta. Hal tersebut disebabkan adanya perolehan kontrak baru di triwulan IV tahun 2019 yang belum bisa diproduksi di akhir tahun (Adhi Karya, 2019). Pada tahun 2020, PT Adhi Karya kembali mengalami penurunan pendapatan menjadi Rp 10.827.682 juta, turun sebesar 29,27% dari tahun sebelumnya. Penyebab penurunan pendapatan pada tahun 2020 sama seperti tahun 2019, yakni perolehan kontrak baru sebagian besar terjadi di triwulan IV sehingga belum bisa terkonversi menjadi pendapatan usaha, ditambah dampak pandemi COVID-19 yang mengharuskan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga tingkat *burn rate* mengalami penurunan sebesar 8,13% dibandingkan tahun sebelumnya (Adhi Karya, 2020). Namun demikian, PT Adhi Karya mencatat pemulihan pendapatan pada tahun 2021 sebesar Rp 11.530.472 juta dan terus meningkat pada tahun 2022 menjadi Rp 13.549.010 juta serta kembali tumbuh signifikan pada tahun 2023 menjadi Rp 20.072.993 juta, didorong oleh peningkatan realisasi proyek infrastruktur nasional dan IKN (Adhi Karya, 2023). Meskipun pendapatan usaha PT Adhi Karya menunjukkan tren pemulihan yang positif, tekanan keuangan yang dialami selama periode pandemi sempat menempatkan perusahaan dalam kondisi rentan terhadap penilaian *going concern* oleh auditor independen, mengingat tingginya beban utang dan

menurunnya kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek pada tahun-tahun sebelumnya.

Pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk, memperoleh pendapatan pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp 48.788.951 juta dan mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi Rp 31.387.390 juta (Waskita Karya, 2019). Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 memberikan tekanan yang signifikan terhadap sektor infrastruktur, yang menyebabkan pendapatan PT Waskita Karya mengalami penurunan yang sangat tajam menjadi Rp 16.190.456 juta (Waskita Karya, 2020). Kondisi tersebut masih berlanjut pada tahun 2021 di mana perusahaan belum menunjukkan tanda pemulihan, mencerminkan turunnya pendapatan sebesar 24,5% menjadi Rp 12.224.128 juta (Waskita Karya, 2021). Penurunan pendapatan disebabkan oleh rendahnya nilai kontrak baru, beban utang yang tinggi, serta tekanan likuiditas dan pembatasan kegiatan akibat pandemi COVID-19 (Dheiva, 2025). Selain itu, sejumlah proyek strategis yang digarap PT Waskita Karya juga belum memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan perusahaan, termasuk beberapa proyek tol seperti Tol Trans Sumatera dan Trans Jawa yang sempat terhambat oleh masalah pembiayaan dan operasional (Dheiva, 2025). Meskipun pada tahun 2022 pendapatan sedikit membaik menjadi Rp 15.300.000 juta, kondisi keuangan PT Waskita Karya tidak kunjung membaik secara fundamental. Pendapatan kembali turun pada tahun 2023 menjadi Rp 10.950.000 juta dan berlanjut pada tahun 2024 menjadi sekitar Rp 10.700.000 juta (Waskita Karya, 2024). Kondisi keuangan yang terus memburuk, ditandai oleh akumulasi kerugian, tingginya beban bunga utang, serta menurunnya ekuitas perusahaan, akhirnya mendorong auditor independen untuk memberikan opini audit *going concern* kepada PT Waskita Karya pada tahun 2022 dan 2023. Hal ini menjadikan PT Waskita Karya sebagai salah satu fenomena nyata penerimaan opini audit *going concern* pada perusahaan BUMN sektor infrastruktur yang menjadi fokus penelitian ini.

Pada PT Wijaya Karya atau WIKA memperoleh pendapatan sebesar Rp 31.158.193 pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2019 WIKA mengalami penurunan 13% menjadi 27.212.923 dari tahun sebelumnya. Penurunan pendapatan

tersebut dikarenakan turunnya pendapatan dari segmen infrastruktur dan gedung pada tahun 2019 (Wijaya Karya, 2019). Pada tahun 2020 PT Wijaya Karya kembali mengalami penurunan pendapatan sebesar Rp 16.536.381 menjadi 39,23% dibanding tahun sebelumnya. Penurunan pendapatan pada PT Wijaya Karya disebabkan oleh dampak covid-19 pada kinerja perusahaan (Wijaya Karya, 2020). Setelah sempat mengalami pemulihan dengan pendapatan yang meningkat menjadi Rp 17.809.718 juta pada tahun 2021 dan Rp 21.480.000 juta pada tahun 2022, pendapatan PT Wijaya Karya kembali menunjukkan tekanan pada tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp 22.594.000 juta namun disertai kerugian bersih yang sangat besar mencapai Rp 7,13 triliun akibat beban keuangan yang membengkak (Wijaya Karya, 2023). Pada tahun 2024, pendapatan usaha WIKA tercatat sebesar Rp 19.240.000 juta, turun dibandingkan tahun sebelumnya, dengan kerugian bersih yang masih berlanjut sebesar Rp 2,27 triliun (Wijaya Karya, 2024). Kondisi keuangan yang memburuk secara struktural, meliputi tingginya beban utang, kerugian yang berkelanjutan, serta melemahnya ekuitas, menyebabkan auditor independen memberikan opini audit *going concern* kepada PT Wijaya Karya pada tahun 2023. Fenomena ini menegaskan bahwa sektor BUMN infrastruktur, meskipun memiliki skala bisnis yang besar dan dukungan pemerintah, tetap rentan terhadap risiko *going concern* apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan keuangan yang *prudent*, khususnya dalam aspek profitabilitas, likuiditas, dan manajemen *leverage*.

Penurunan pendapatan pada perusahaan diatas tersebut menunjukkan bahwa adanya tekanan terhadap kinerja keuangan perusahaan khususnya pada aspek kinerja keuangan. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban operasional dan pendanaannya, tetapi juga dapat berdampak pada pelaksanaan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Meskipun kinerja keuangan perusahaan mengalami tekanan, perusahaan tetap memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bentuk komitmen terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

Pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pelaksanaan CSR diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, perusahaan BUMN wajib mengalokasikan dana CSR minimal 4% dari laba bersih perusahaan (Kementrian BUMN, 2021). Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR pada perusahaan BUMN bersifat wajib dan menjadi bagian dari kebijakan perusahaan dalam memberikan manfaat sosial dan lingkungan bagi masyarakat. Dengan demikian, meskipun perusahaan mengalami tekanan kinerja keuangan, BUMN tetap memiliki kewajiban untuk melaksanakan dan mengungkapkan kegiatan CSR sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan upaya menjaga keberlanjutan usaha perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut, kinerja keuangan dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat menjadi indikator penting dalam opini *going concern*. Kinerja keuangan yang tercermin melalui rasio likuiditas, profitabilitas, dan leverage menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban serta menghasilkan laba, sedangkan CSR mencerminkan komitmen perusahaan dalam menjaga keberlanjutan usaha dan tanggung jawab sosialnya.

Rasio kinerja keuangan yang memengaruhinya opini *going concern* adalah rasio likuiditas. Dalam penelitian ini rasio likuiditas diukur dengan menggunakan *Current Ratio* (CR). *Current Ratio* (CR) adalah rasio yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam pembayaran kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar yang tersedia (Kasmir, 2019;111). Apabila perusahaan tidak mampu memenuhi klaim kreditor dalam jangka pendek maka akan memengaruhi kredibilitas perusahaan dan dapat dianggap sebagai suatu sinyal bahwa perusahaan sedang menghadapi masalah yang dapat mengganggu kelangsungan hidupnya (Firda & Aulia, 2022). Dengan demikian, *Current Ratio* (CR) diukur untuk menilai tingkat kinerja keuangan dan likuiditas perusahaan, di mana nilai rasio yang memadai mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu, sehingga dapat meminimalkan risiko keraguan atas kelangsungan usaha (*going concern*) dan menekan kemungkinan diterimanya opini audit *going concern*.

Penelitian yang dilakukan oleh Firda et al., (2022), Dhian (2023) dan Ni Kadek et al., (2023) menunjukkan bahwa *current ratio* (CR) berpengaruh terhadap

opini audit *going concern*. Namun berbeda dengan penelitian Maria (2021), Pratomo (2025), Wuri (2024), Glorious (2023), Gisela et al., (2022), dan Selvia (2021) yang menunjukkan *current ratio* (CR) tidak berpengaruh terhadap opini *going concern*. Hal ini menunjukkan bahwa seorang auditor tidak hanya berfokus pada kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, melainkan juga mempertimbangkan aspek keuangan dan nonkeuangan lainnya dalam menilai kelangsungan usaha.

Selain rasio likuiditas, rasio profitabilitas menjadi indikator penting apakah suatu perusahaan dapat melanjutkan usahanya untuk periode berikutnya. Dalam penelitian ini rasio profitabilitas diukur dengan menggunakan *Return on Assets* (ROA). *Return on Assets* (ROA) adalah rasio yang dapat mengukur hasil pengembalian dari semua aset yang digunakan oleh perusahaan. Besarnya rasio ini menunjukkan semakin besar kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, sehingga tidak menimbulkan keraguan auditor akan kelangsungan hidup perusahaan (Firda & Aulia, 2022). Nilai *Return on Assets* (ROA) yang lebih tinggi menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan semakin baik, sehingga kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya juga meningkat. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang baik dan dinilai mampu mempertahankan kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, auditor cenderung tidak memberikan opini audit *going concern* pada perusahaan dengan nilai *Return on Assets* (ROA) yang tinggi Wuri & Syifa (2024). Dengan demikian, pengukuran *Return on Assets* (ROA) dilakukan untuk melihat tingkat kinerja profitabilitas perusahaan, di mana kemampuan menghasilkan laba yang tinggi mencerminkan kesehatan perusahaan dan meminimalkan potensi diterimanya opini audit *going concern*.

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Pratomo & Laksito (2025), Seppi et al., (2024), Diana et al., (2023), Glorious (2023), Yosua (2022), Firda & Aulia (2022) dan Selvia (2021) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh terhadap opini *going concern*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wuri & Syifa (2024), De Haan & Sari (2023), Maria et al., (2021), dan Angga (2021) yang menunjukkan bahwa *Return on Assets* (ROA) tidak berpengaruh terhadap opini

audit *going concern*. Hal ini menunjukkan bahwa *Return on Assets* (ROA) tidak memiliki hubungan dengan peningkatan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya sehingga tidak mempengaruhi keputusan auditor dalam pemberian opini *going concern*.

Rasio leverage juga menjadi salah satu indikator yang dipertimbangkan auditor dalam memberikan opini *going concern*. Dalam penelitian ini rasio leverage diukur dengan menggunakan *Debt to Assets Ratio* (DAR) digunakan untuk mengukur rasio leverage. Semakin tinggi *Debt to Assets Ratio* (DAR), maka akan semakin menimbulkan keraguan auditor akan kelangsungan hidup perusahaan tersebut, karena sebagian besar dana yang diperoleh perusahaan akan digunakan untuk membiayai utang (Wuri & Syifa, 2024). Dengan demikian, *Debt to Assets Ratio* (DAR) diukur untuk menilai tingkat leverage dan kinerja keuangan perusahaan, di mana rasio utang yang terkendali menjadi sinyal positif bahwa entitas mampu mengelola kewajibannya sehingga terhindar dari potensi penerbitan opini audit *going concern*

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Seppi et al., (2024), Wuri & Syifa (2024), Gisela et al., (2022), Kusuma (2021), De Haan & Sari (2023), Shufia et al., (2023), Dhian et al., (2023), Yosua (2022) dan Ria et al., (2024) menunjukkan bahwa *Debt to Aset Ratio* (DAR) berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Maria et al., (2021), Glorious (2023) dan Selvia (2021) menunjukkan bahwa *Debt to Aset Ratio* (DAR) tidak berpengaruh terhadap opini *going concern*.

Selain dari kinerja keuangan, yang memengaruhi opini *going concern* adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR). *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial serta alam dengan tujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pencapaian keuntungan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup untuk keberlanjutan jangka panjang (Kholis, 2020;3). Semakin tinggi nilai *Corporate Social Responsibility* (CSR) maka semakin baik perusahaan dalam menjalankan kelangsungan usaha (Susi, 2023). Dengan demikian, *Corporate Social*

Responsibility (CSR) diukur untuk melihat komitmen keberlanjutan entitas, di mana pelaksanaan tanggung jawab sosial yang optimal memberikan sinyal positif bagi auditor bahwa perusahaan memiliki hubungan harmonis dengan pemangku kepentingan yang mendukung keberlangsungan usahanya.

Penelitian yang dilakukan oleh Susi (2023), Ni Kadek (2023), dan Gine (2021) menunjukkan bahwa CSR berpengaruh terhadap opini *going concern*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Angga (2021), Wuri & Syifa (2024), De Haan & Sari (2023), dan Glorious (2023) menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak berpengaruh terhadap opini *going concern*. Perusahaan dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kelangsungan usaha atau opini *going concern* yang baik, serta hubungan yang baik terhadap pemangku kepentingan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, terdapat beberapa kesenjangan penelitian (*research gap*) yang mendasari pentingnya penelitian ini dilakukan. Pertama, dari segi objek penelitian, mayoritas penelitian terdahulu mengenai opini audit *going concern* dilakukan pada perusahaan sektor manufaktur, properti, dan pertambangan, sementara penelitian pada perusahaan BUMN sektor infrastruktur masih relatif terbatas, padahal sektor ini memiliki karakteristik yang unik, antara lain skala proyek yang besar, ketergantungan pada pembiayaan utang jangka panjang, serta peran strategis dalam pembangunan nasional.

Kedua, dari segi periode penelitian, penelitian ini menggunakan rentang waktu 2019-2024 yang mencakup periode terjadinya pandemi COVID-19 hingga masa pemulihan setelah pandemi, sebuah kondisi yang berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan BUMN infrastruktur namun belum banyak dikaji dalam konteks opini audit *going concern*.

Ketiga, dari segi variabel penelitian, kombinasi antara *Current Ratio* (CR), *Return on Asset* (ROA), *Debt to Asset Ratio* (DAR), dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dianalisis secara bersamaan dengan dikaitkan pada sudut pandang Islam pada perusahaan BUMN sektor infrastruktur merupakan kombinasi variabel yang belum banyak digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru

dalam memperkaya literatur mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi opini audit *going concern*, khususnya pada perusahaan BUMN sektor infrastruktur.

Ditinjau dari sudut pandang Islam, auditor memiliki peran penting dalam perantara antara pemangku kepentingan atau investor dengan perusahaan. Auditor bertanggung jawab dalam memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan perusahaan telah sesuai dengan standar akuntansi dan bebas dari kecurangan. Kebanaran atas laporan keuangan merupakan hal yang diperintahkan dalam Islam, dimana setiap transaksi perusahaan harus dicatat secara jujur tanpa adanya penambahan atau pengurangan. Pemeriksaan atas catatan transaksi keuangan perusahaan dalam akuntansi disebut sebagai auditing. Praktik terkait pentingnya proses auditing. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hujuraat ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ لَدْغِينَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu”.

Ayat tersebut menegaskan pentingnya memiliki sikap kehati-hatian, ketelitian dan kejujuran dalam memeriksa suatu informasi sebelum disampaikan kepada pihak lain. Selain itu juga, sejalan dengan proses auditing, dimana auditor diuntut untuk memeriksa dan menilai kewajaran laporan keuangan secara objektif dan independen sebelum memberikan opini audit. Opini audit yang dihasilkan, khususnya opini *going concern*, menjadi informasi penting bagi para pemangku kepentingan dalam menilai kemampuan perusahaan mempertahankan kelangsungan usahanya.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Pengaruh Kinerja Keuangan dan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Opini Going Concern (Studi Empiris Pada Perusahaan BUMN Sektor Infrastruktur Periode 2019-2024)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah *Current Ratio* (CR) berpengaruh terhadap Opini *Going Concern* pada perusahaan BUMN sektor infrastruktur periode 2019 - 2024?
- b. Apakah *Return on Asset* (ROA) berpengaruh terhadap Opini *Going Concern* pada perusahaan BUMN sektor infrastruktur periode 2019 - 2024?
- c. Apakah *Debt to Asset Ratio* (DAR) berpengaruh terhadap Opini *Going Concern* pada perusahaan BUMN sektor infrastruktur periode 2019 - 2024?
- d. Apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap Opini *Going Concern* pada perusahaan BUMN sektor infrastruktur periode 2019 - 2024?
- e. Bagaimana *Current Ratio* (CR), *Return on Asset* (ROA), *Debt to Asset Ratio* (DAR), *Corporate Social Responsibility* (DAR) Opini *Going Concern* ditinjau dari Sudut Pandang Islam pada perusahaan BUMN sektor infrastruktur periode 2019 – 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui apakah *Current Ratio* berpengaruh terhadap Opini *Going Concern* pada perusahaan BUMN sektor infrastruktur periode 2019–2024.
- b. Untuk mengetahui apakah *Return on Asset* berpengaruh terhadap Opini *Going Concern* pada perusahaan BUMN sektor infrastruktur periode 2019–2024.
- c. Untuk mengetahui apakah *Debt to Asset Ratio* berpengaruh terhadap Opini *Going Concern* pada perusahaan BUMN sektor infrastruktur periode 2019–2024.

- d. Untuk mengetahui apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap Opini *Going Concern* pada perusahaan BUMN sektor infrastruktur periode 2019 – 2024.
- e. Untuk mengetahui *Current Ratio* (CR), *Return on Asset* (ROA), *Debt to Asset Ratio* (DAR), *Corporate Social Responsibility* (DAR), *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Opini *Going Concern* ditinjau dari Sudut Pandang Islam pada perusahaan BUMN sektor infrastruktur periode 2019 - 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan untuk penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan literatur akuntansi dan auditing, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara kinerja keuangan, CSR dan Opini *Going Concern* dalam konteks perusahaan BUMN sektor infrastruktur di Indonesia.

- b. Manfaat Praktis

Bagi peneliti, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai penerapan teori akuntansi dan auditing dalam kondisi nyata perusahaan. Bagi auditor maupun pengguna laporan keuangan, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi tambahan mengenai pengaruh kinerja keuangan, CSR dan Opini *Going Concern* sehingga dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan serta penilaian terhadap kondisi perusahaan.

- c. Manfaat Bagi Perusahaan BUMN Sektor Infrastruktur

Bagi perusahaan BUMN sektor infrastruktur, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja keuangan, tata kelola, dan efektivitas strategi CSR guna memperkuat reputasi serta keberlanjutan usaha (*going concern*).